

PESANTREN DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL

Oleh: Imam Moedjiono

Jurusan dan Ketua Jurusan Tarbiyah FLAI UII

ABSTRACT

It's interesting to discuss and research pesantren –as Islamic Education Institution- from many perspectives. Especially in social economic and politics change which happen in Indonesia. Many activities are holding by pesantren, which indicate pesantren pays attention to Moslem community empowerment, in order to they do not collapse to the worst condition. More over pesantren is potential to anticipate many situations proactively to aim better condition of ummat in the future.

Key Word: Islamic education institution, social-economic changes

A. Pendahuluan

Anggapan selama ini secara kualitatif, masyarakat Indonesia memiliki tataran ekonomi yang “relatif rendah”. Pada sisi lain, secara kuantitatif mayoritas masyarakat yang berada pada taraf sosial ekonomi kurang menggembirakan tersebut merupakan pemeluk agama Islam, atau setidaknya mereka adalah penganut tradisi keislaman secara turun-temurun, yang secara demografis tinggal di lingkungan pesantren. Sebenarnya banyak kalangan pesantren memiliki posisi strategis untuk memberdayakan masyarakat muslim tentunya dengan tetap berpijak pada nilai-nilai kultural yang melandasinya.

Pesantren merupakan sebuah sistem pendidikan Islam yang unik dan khas, yang dengan kekhasannya memiliki peluang untuk berkkiprah dalam kehidupan sosial. Terlebih di tengah dinamika perubahan sosial ekonomi dan politik yang sedang berlangsung dengan cepat di Indonesia. Tulisan ini bermaksud menguak peran pesantren di tengah berbagai perubahan sosial yang sedang terjadi di Indonesia.

B. Profil dan Karakteristik Pesantren

Ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk merujuk jenis pendidikan Islam tradisional khas Indonesia ini.

Di Jawa, termasuk Sunda dan Madura digunakan istilah pesantren atau pondok (Dhofier, 1990:18), atau pondok pesantren (Ali, 1987: 15). Di Aceh dikenal dengan istilah dayah, atau rangkang atau meunasah, sedang di Minangkabau disebut surau (Rahardjo, 1985:5). Secara terminologis, dapat dikemukakan beberapa pandangan yang mengarah pada definisi pesantren. Wahid (1988: 173) memaknai pesantren secara teknis sebagai *'a place where santri (student) live'*, sedangkan Mas'ud (1988: 25) menulis *'the word 'pesantren' stem from santri which means one who seeks Islamic knowledge. Usually the word pesantren refers to a place where the santri devotes most of his / her time to live in and acquire knowledge'*.

Pesantren adalah bagian dari struktur internal pendidikan Islam di Indonesia yang diselenggarakan secara tradisional, untuk menginternalisasikan Islam sebagai cara hidup. Abdullah (1995:3) mendeskripsikan, bahwa dalam berbagai variasinya dunia pesantren merupakan pusat persemaian, pengamalan dan sekaligus penyebaran ilmu-ilmu keislaman.

Ali (1987:17-18) secara rinci mengidentifikasi beberapa karakteristik pesantren antara lain: (1) adanya hubungan akrab antara sesama santri; (2) *ketawadluan* santri terhadap kyai; (3) kesederhanaan hidup; (4) kemandirian sikap; (5) semangat tolong-menolong sebagai saudara. Dhofier (1990: 44) menyatakan bahwa pondok, masjid, santri, pengajaran agama dan kyai merupakan

lima elemen dasar tradisi pesantren. Dengan begitu sebuah lembaga pendidikan atau pengajian yang telah berkembang sehingga memiliki kelima elemen tersebut akan dapat berubah statusnya menjadi pesantren.

Dalam perjalanan sejarahnya, lembaga pesantren mengalami dinamika yang tidak pernah berhenti, sejalan dengan dinamika sosial yang terjadi. Bila dicermati dalam kerangka historis, definisi pesantren yang diajukan Dhofier yang menyebutkan lima elemen pesantren, barangkali dapat —untuk tidak mengatakan tidak relevan—, karena dapat jadi elemen pesantren pada realitas sekarang tidak hanya lima saja, tetapi lebih dari itu (Ismail SM, 2000:174). Karakteristik pesantren yang sangat menonjol, pada umumnya dipengaruhi oleh tujuan pesantren itu sendiri. Secara umum Dhofier (1990:21) merumuskan bahwa tujuan pendidikan pesantren tidak semata-mata memperkaya pikiran santri dengan penjelasan-penjelasan, tetapi meninggikan moralitas, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku jujur dan bermoral, serta mempersiapkan para santri hidup sederhana dan bersih hati.

Dari uraian di atas terlihat jelas profil pesantren, yang mengindikasikan bahwa kehadirannya bukan saja merupakan manifestasi kepedulian umat Islam untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan juga merupakan upaya menciptakan sumbu utama

dinamika sosial, budaya dan keagamaan masyarakat Islam tradisional yang membentuk subkultur secara sosio-antropologis. Dapat dielaborasi lebih jauh, bahwa apa yang disebut sebagai pesantren, bukan semata wujud fisik tempat belajar agama dengan seperangkat bangunan, kitab kuning, santri dan kyai. Pengaruh pesantren tidak hanya terbatas pada kehidupan alumni bersama keluarganya saja, melainkan juga pada kehidupan masyarakat di sekitar pesantren. Lebih dari itu, masyarakat yang tinggal di sekitar pesantren dan para alumninya akan terimbas "radiasi kultur" yang tercermin pada homogenitas perilaku, pola sikap, bahasa dan budaya. Mengingat alumni pesantren pada umumnya menjadi "panutan" orang di sekelilingnya, maka dapat diduga betapa besarnya peran pesantren dalam memberikan "warna" bagi kehidupan masyarakat.

C. Pesantren di tengah perubahan sosial

Pesantren adalah sebuah sub-kultur kharismatis yang relatif homogen, dengan sosok kyai sebagai sentral figur dikelilingi santri yang disatukan dalam pola hidup penuh kesalihan. Budaya pesantren telah melahirkan persekutuan iman dan persaudaraan atas dasar kepercayaan dan kecintaan pada paham yang dibawa oleh guru yang muktabar dan kharismatis (Abdurrahman, 1995:58).

Kehidupan spiritual pesantren yang syahdu penuh kesejukan telah berlangsung berabad-abad, sampai datangnya masa awal industrialisasi yang menciptakan suasana keterasingan dan kontradiksi di luar pesantren. Bahkan semangat materialisme serta *vested interest* mulai mewarnai kehidupan sebagian tokoh masyarakat. Pada masa tersebut "materi" mulai didewakan, tradisi dipertanyakan, hubungan sosial mulai longgar, kharisma sebagian tokoh spiritual mulai pudar, kehidupan sebagian umat mulai permisif, dan sebagian mengarah kepada hedonistik. Sedikit-banyak suasana luar tersebut ada yang merembes ke dalam pesantren.

Perubahan sosial berjalan dengan begitu cepat, sehingga perangkat kultural sering tidak sejalan dengan perubahan struktural, bahkan ada yang bersebarangan dengan nilai spiritual. Hal inilah yang antara lain mengakibatkan runtuhnya sebagian nilai-nilai komunal pada masyarakat tradisional. Hampir semua peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat dapat diikuti oleh para santri melalui media cetak maupun elektronik, maka tidaklah mengherankan jika santri dapat mengetahui fenomena yang terjadi seperti betapa rentannya nilai tukar rupiah terhadap dolar, tingginya angka kriminalitas, rendahnya tingkat pendapatan per kapita, naik-turunnya suhu politik, tinggi-rendahnya moralitas elit, meningkatnya angka perceraian para artis. Semua itu peristiwa yang terjadi di luar dinding pesantren. Meskipun

disadari ada juga santri yang tidak pernah sempat mengakses berbagai informasi tersebut. Namun demikian rembesan informasi dunia luar pesantren tetap sampai.

Tingkat keaktifan dalam mengakses informasi berpengaruh secara signifikan terhadap respon pesantren terhadap berbagai fenomena sosial di atas. Respon yang tercermin pada sikap, akan mengindikasikan peran yang diambil. Secara garis besar, respon pesantren terhadap dunia luar terlihat heterogen, yaitu (1) ada yang membuka diri, dan melakukan dialog dengan berbagai kalangan di luar pesantren untuk mencari solusi bersama, serta menyikapi secara kritis dan penuh peduli; (2) ada yang secara proaktif mengikuti irama sosial ekonomi dan politik; (3) ada pula yang diam seribu bahasa dengan tetap berkatat pada rutinitas pendalaman keagamaan, tanpa mempedulikan berbagai suasana dan problematika yang mendera umat.

Serangkaian fenomena tersebut sesungguhnya merupakan tantangan yang mau-tidak mau, suka tidak suka, harus dijawab oleh pihak pesantren dan beberapa kalangan yang concern dengan persoalan pendidikan pesantren. Tentunya dalam menghadapi dan memecahkan serangkaian permasalahan tersebut tidak boleh lelah. Sebab pesantren dilahirkan, setidaknya untuk memberikan respons terhadap situasi dan kondisi sosial suatu masyarakat yang tengah dihadapkan pada runtuhnya nilai-nilai moral, melalui transformasi

nilai yang ditawarkan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Di samping itu pesantren memiliki misi untuk menyebarluaskan informasi tentang universalitas Islam (Saefuddin Zuhri 1999). Dengan kalimat lain pesantren harus dapat berperan sebagai kompas bagi umat yang kehilangan pedoman, tongkat bagi umat yang kehilangan pegangan dalam mengarungi kehidupan, serta menjadi payung bagi umat yang membutuhkan perlindungan.

D. Peran Pesantren

Berbagai kegiatan yang berlangsung di sebagian besar pesantren sebenarnya mengindikasikan kepedulian pesantren terhadap pemberdayaan umat. Pesantren memiliki multiperan dalam memberdayakan umat. Di bidang keagamaan, pesantren menjadi sarana efektif untuk melakukan *tafakkuh fiddin* yang sulit dicari tandingannya, karena dalam pesantren, ilmu agama tidak hanya dipelajari tetapi juga diinternalisasikan dan diamalkan secara nyata.

Dalam bidang kemasyarakatan, pesantren masih berada di garda depan karena tidak teralienasi dari masyarakat, melainkan berada ditengah-tengah masyarakat dan selalu berupaya mencari solusi untuk mengatasi problematika masyarakat. Sementara di bidang kesehatan, pesantren sering dijadikan partner pemerintah untuk melakukan sosialisasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah kesehatan, melalui berbagai kegiatan da'wah yang dilakukan oleh para ustadz dari kalangan pesantren.

Di bidang kesejahteraan masyarakat, pesantren juga bersikap proaktif melalui pemberian skill di bidang pertanian, peternakan, perikanan, bisnis atau manajemen. Di bidang kebudayaan, pesantren masih menjadi sarana efektif mempertahankan kebudayaan Islam dan menyaring kebudayaan luar yang dipandang kurang selaras dengan ajaran Islam.

Di bidang politik, sejauh tidak terjebak pada perangkat politik, pesantren memiliki potensi untuk memberikan pendidikan politik bagi santri maupun masyarakat sekitar, sehingga tidak terjebak pada fanatisme politik secara sempit dan taklid buta pada aliran politik tertentu. Di bidang pendidikan, pesantren dipercaya sebagai lembaga pendidikan yang berpihak pada kerakyatan dan keumatan yang murah, bahkan pesantren sebenarnya memiliki peran strategis dalam membangun pendidikan nasional. Di bidang penerangan, pesantren dapat dijadikan filter berbagai informasi yang simpang siur dan cenderung membingungkan umat, sejauh tetap berada pada posisi netral dan menjauhkan diri dari sikap taqlid buta.

Harapan umat terhadap pesantren sering terlihat berlebihan, tetapi harus dipandang dengan *positive thinking*, bahwa hal tersebut merupakan indikasi kepercayaan dan penghargaan umat terhadap pesantren. Berbagai problematika umat seolah menjadi tanggung jawab pesantren. Namun demikian tidak pada tempatnya, jika umat hanya me-

nyerahkan semua persoalan kepada pesantren tanpa berupaya membantu mencari alternatif solusi.

Sikap sinergis dari berbagai kalangan potensial yang memiliki kaitan erat dengan pemberdayaan umat, merupakan langkah yang direkomendasikan untuk mengatasi persoalan umat. Pesantren sebagai salah satu elemen potensial dalam upaya pemberdayaan umat memiliki peran strategis. Untuk memperoleh hasil yang signifikan, maka implementasi peran ini harus dilakukan secara sinergis oleh berbagai kalangan terkait, termasuk pesantren.

E. Peran Sosial Ekonomi Pesantren.

Pesantren memiliki potensi untuk memberdayakan ekonomi umat. Hal ini karena jaringan relasi pesantren pada umumnya luas dan bervariasi, mulai kalangan pejabat, pedagang, petani, LSM dan para tokoh masyarakat. Kekuatan jaringan ini dapat dijadikan modal utama dalam pemberdayaan ekonomi umat. Kalau saja pesantren mampu menjembatani berbagai kalangan tersebut secara baik, maka akan terwujud sebuah potensi dahsyat dan prospektif.

Di samping itu pesantren memiliki SDM yang siap didik yang terdiri dari santri potensial. Kalau saja para santri tersebut digladi, digembleng dan digodog dengan wawasan dan skill di bidang tertentu, akan menjadi tenaga mumpuni, cekatan, terampil dan amanah.

Namun bukan berarti pesantren tidak memiliki kelemahan di bidang pemberdayaan ekonomi umat. Kelemahan utama pada umumnya terletak pada *planning skill* atau ketrampilan membuat perencanaan. Akibatnya banyak gagasan bagus yang mubadzir lantaran ketidakmampuan merumuskan gagasan tersebut dalam bentuk proposal. Secara teknis hal ini dapat dipelajari dengan mudah, sejauh ada keinginan kuat untuk mempelajarinya.

Kelemahan lain adalah dalam pengorganisasian. Pola organisasi sebagian santri terjebak pada rutinitas organisasi yang terkadang tidak memiliki basis keilmuan tentang organisasi, melainkan lebih banyak didasarkan pada feeling dan "ijtihad" organisatornya dengan mengandalkan kewibawaan santri senior. Hal ini dapat diatasi dengan mengundang ahli manajemen dan leadership untuk mensosialisasikan teori-teori organisasi dan kepemimpinan yang moderen. Di samping itu secara insidental juga dapat didatangkan pasangan pakar dan praktisi di bidang tertentu seperti dalam bidang bisnis ritel, grossir, garment, pertanian, peternakan, kerajinan tangan, serta berbagai bidang lain yang sekiranya relevan dan visible.

Kelemahan lobi dan negosiasi sebenarnya tidak dimiliki oleh semua pesantren, karena sebagian pimpinan pesantren justru jago lobi dan negosiasi, terutama dalam hal pemenuhan fasilitas, tetapi terkadang belum menyentuh persoalan yang mendasar yakni di bidang pemberdayaan ekonomi umat. Pesantren

sebenarnya memiliki potensi dan peluang memberdayakan ekonomi umat melalui beberapa cara, antara lain melalui zakat.

Disahkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta Keputusan Menteri Agama No 581 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat (Hartono, 2000: 232), adalah fenomena menarik sebagai bagian dari dinamika dialektika politik, ekonomi dan keagamaan (Islam) dalam kehidupan bernegara. Betapa tidak, zakat yang selama ini lebih banyak dianggap sebagai kewajiban individual-religious yang dalam pengelolaannya lebih banyak diserahkan kepada umat secara otonom kemudian bergeser menjadi sebuah pranata formal legalistik yang diatur negara.

Dalam perspektif ekonomi, institusionalisasi zakat ini dapat dipandang sebagai pengakuan formal atas zakat sebagai satu resources pembangunan. Pengakuan ini tentu saja membawa implikasi berupa keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat, sekaligus memikirkan lebih lanjut tentang keberadaannya, sebagai bagian dari variable model ekonomi secara keseluruhan.

Di dalam pendistribusiannya, pesantren merupakan salah satu patner yang tepat karena di samping memiliki peta potensi umat, juga dapat diajak merumuskan program penyaluran agar lebih tepat sasaran. Hal ini untuk lebih mengoptimalkan manfaat zakat yang ada, melalui kegiatan pengentasan kemiskinan dengan kegiatan yang lebih

bersifat produktif dan bukan konsumtif. Dengan kalimat lain tidak dengan memberikan ikan, melainkan memberikan pancing, dan informasi cara memancing ikan yang efektif serta cara memilih lokasi memancing yang tepat.

Di samping membantu mengelola zakat yang disalurkan negara, pesantren juga dapat melakukan koordinasi dengan Pemda, Depag dan wajib zakat untuk mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Di sinilah kelihaian lobi dan negosiasi pesantren untuk bersikap proaktif teruji, sekaligus kemampuan merumuskan konsep pendistribusian secara konseptual dan tepat sasaran.

Peluang lain yang dimiliki oleh pesantren adalah pengelolaan BMT, tentunya untuk itu, pesantren melakukan pemberdayaan diri dalam pengelolaan administrasi dan organisasi BMT. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas pihak pengelola BMT yang dalam hal ini adalah pesantren. Kredibilitas ini diperlukan karena menyangkut persoalan kepercayaan atas kemampuan pengelolaan, dan hal ini dapat membangun citra profesional serta amanah dalam pandangan umat.

Persoalan pengelolaan dana umat merupakan kapling rawan sorotan, apalagi di era reformasi ini, harus lebih transparan. Kapabilitas dan akuntabilitas menjadi syarat pengelola, karena hal tersebut akan dapat meningkatkan kredibilitas. Jika kredibilitas pengelolaan BMT dapat terjaga, maka hal tersebut akan memiliki implikasi positif bagi pesantren sebagai pengelolanya.

F. Peran Sosial Politik Pesantren

Pesantren telah berkiprah dalam kancah politik sejak zaman penjajahan. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah, banyak didukung dan dimotori oleh para santri dan kyai dari pesantren-pesantren yang telah ada pada masa tersebut. Gema takbir, penumbuhan semangat jihad, dan konsep mati syahid bagi pejuang yang gugur dalam melawan penjajah, merupakan motivasi yang ditumbuhkan dalam dada para pejuang oleh para kyai dan ulama'.

Sesudah merdeka, dari kalangan pesantren banyak yang aktif di dunia politik sebagai bentuk keterpanggilan untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Banyaknya alumnus pesantren bahkan kyai dalam kancah politik, baik sebagai pengurus partai maupun sebagai anggota legislatif, telah memberikan warna tersendiri dalam kehidupan politik bangsa. Di masa Orde Lama, saat politik dijadikan panglima, para tokoh politik kaum santri senantiasa berada di garis depan dalam menghadapi trik-trik licik komunis, maupun dalam melemparkan ideologi komunis dari bumi Indonesia.

Pada masa Orde Baru saat ekonomi dan pembangunan dijadikan panglima, peran politik pesantren juga tidak dapat diabaikan. Banyaknya kyai dan alumnus pesantren yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif, merupakan bukti adanya sumbangsih pesantren bagi upaya mengisi kemerdekaan. Lebih dari itu, tanpa dukungan para ulama dan kyai, program pemerintah dalam

masalah perbankan, keluarga berencana, kesehatan masyarakat, dan transmigrasi setidaknya akan banyak menemui kendala.

Di era reformasi, sumbangan pesantren dalam peran sosial politik semakin signifikan. Di antara pengurus (hampir) semua partai politik, baik tingkat pusat maupun daerah, terdapat alumni atau pimpinan pesantren. Demikian pula halnya dalam lembaga legislatif. Kehadiran santri dalam dunia politik sering mengundang dilema. Dunia politik yang sarat muatan kepentingan, tidak jarang berseberangan dengan nilai-nilai kesalehan yang pernah diperoleh di dunia pesantren. Akibatnya gesekan antartokoh sesama alumni pesantren tak terelakkan, bahkan fitnah yang dikecam keras dunia pesantren terkadang dilakukan, untuk kepentingan politik tertentu.

Ukhuwah yang menjadi ciri santri, terkadang dikorbankan untuk kepentingan politik kelompok. Akibatnya persaudaraan seiman dan seagama turut dikorbankan, demi dan atas nama kepentingan politik kelompok. Barangkali hal ini yang dimaksud dengan jargon "dalam politik tidak ada persahabatan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi".

Pergesekan antartokoh Islam, organisasi Islam atau kaum santri mengundang keprihatinan yang mendalam. Fanatisme kelompok dan semangat ashobiyah, seharusnya dapat dieliminir sedemikian rupa di kalangan umat Islam. Perbedaan pendapat, warna ben-

dera, dan partai seharusnya tidak boleh dijadikan alasan untuk saling benci, saling fitnah apalagi menghalalkan darah saudara seagama dan sebangsa.

Para elite seharusnya memahami bahwa sebagai bangsa yang paternalis, umat yang berada pada lapisan bawah cenderung mengikuti gerak langkah mereka dengan taasub dan berlebihan, oleh karenanya dituntut sikap ekstra hati-hati dalam bertindak dan berbicara. Perbedaan pendapat dan sikap para elite sebenarnya tidak menjadi masalah, sejauh dilakukan dengan elegan, etis, luwes dan gentle. Oleh karenanya, para elite diharapkan dapat memiliki dan mempertahankan kearifan sifat dan sikap. Arogansi elite memiliki potensi dahsyat untuk memporak-porandakan kehidupan bangsa, bahkan dapat menghancurkan masa depan bangsa ini.

Kehadiran kaum santri di pentas politik nasional, seharusnya dapat mendatangkan suasana teduh dan menyejukkan, bukan suasana panas dan menyekatkan. Jika para elite sulit diharapkan untuk mendekatkan jarak antara yang senyatanya menuju yang seharusnya, maka kepada para kyai yang tetap menekuni pelaksanaan pendidikan di pesantren, atau kepada para da'i yang aktif berda'wah, sedapat mungkin memberikan penjelasan yang menyejukkan dengan mengambil jarak sama dengan semua kekuatan sosial politik, terutama yang bernafaskan Islam.

Netralitas para tokoh yang jauh dari interes pribadi dan golongan, diharapkan dapat mendatangkan suasana yang kondusif, di tengah suasana panas ini.

Jika para tokoh lokal sudah terlanjur dikenal sebagai sosok partisan sudah barang tentu memiliki keberpihakan kepada partai politik tertentu, maka sedikit-tidaknya diharapkan dapat bersikap elegan, fair, jujur dan etis. Dilema lain, adalah banyaknya tokoh pesantren yang tampil di pentas politik nasional, sehingga pesantren lebih banyak ditinggalkan untuk urusan sidang-sidang lembaga legislatif, penggalangan massa maupun kampanye. Terlalu besar pengorbanan para tokoh jika harus ditebus dengan menelantarkan pesantren yang dipimpinnya.

Pengetahuan dan pengalaman para kyai di bidang politik seharusnya ditularkan dan disosialisasikan kepada para santri. Contoh-contoh yang dilihat, didengar dan dialami, baik positif maupun negatif dapat dijadikan ilustrasi dalam membahas fiqh-siyaasah di hadapan para santri, agar kelak dapat tampil sebagai sosok politisi yang elegan, sopan dan mampu menghargai orang lain meskipun berbeda pendapat dan tidak suka memaksakan pendapat kepada orang lain.

Para kyai memiliki peluang besar untuk melahirkan kader-kader pemimpin masa depan yang memiliki kecerdasan dan kearifan sikap. Masa depan santri banyak bergantung pada kapabilitas dan kredibilitas kyai yang memiliki otorita kuat di pesantren. Di bawah asuhan seorang kyai yang berwawasan luas, mampu bersikap luwes, mau ber-

sinergi dan bersikap demokrat, akan lahir tokoh-tokoh masa depan, yang dapat membawa bangsa keluar dari berbagai kemelut persoalan sosial, ekonomi, dan politik.

Dari serangkaian uraian di atas dapat diketahui secara pasti bahwa pesantren memiliki sejarah panjang dalam upaya pemberdayaan umat, dan memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat serta pemberdayaan politik umat. Untuk membangun citra Islam, kepada para elite politik muslim, baik yang berasal dari kalangan pesantren maupun luar pesantren diharapkan dapat membangun komitmen nilai dan meninggalkan komitmen figur, serta bersikap elegan dan dapat mempertahankan kesalihannya.

Untuk meneguhkan peran pesantren di tengah belantara masalah umat, Rojaya dalam Pesantren Net (<http://www.Uncalan> 19.2001) merekomendasikan bahwa pesantren harus berani membenahi dirinya dalam berbagai aspek positif-konstruktif yang antara lain meliputi: manajemen pesantren, pemberdayaan ekonomi, kemampuan berbahasa asing, penguasaan informasi, dan beberapa aspek lain yang dirasa perlu serta relevan untuk dilaksanakan sebagai upaya pembenahan internal pesantren. Kalau saja harapan di atas dapat menjelma menjadi kenyataan, maka Islam-pun akan dapat *ya'lu wala yu'la alaiib*. Amien.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (1995) *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdurrahman, M. (1995). *Islam Transformatif*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Ali, M. (1987). *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dhofier, Z. (1990). *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Hartono, Arief (2000). *UNISIA* No.41/XXII/IV/2000
- Ismail SM. (2000). *Pendidikan Islam, Demokrasi dan Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mas'ud, A. (1988). "*Why the Pesantren as Center for Islamic Studies Remain Unique and Stronger in Indonesia?*", Makalah seminar International di Prince of Songkha University Patani, tanggal 25-28 Juni 1998
- Rahardjo, D. (1985). *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.
- Rojaya, <http://www.Sajadah.net/pesantren.net/asp?uncalan> 19
- Wahid, A. (1988). "*Principles of Pesantren education*", dalam Manfred Oepen and Wolfgang Karcher (eds). *The impact of Pesantren*, Jakarta: P3M.
- Zuhri Saefuddin, (1999). <http://www.smu-net.com/main.php?ag&xkd=16>